



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**KE *FINANCE-BUDGET COMMITTEE –
NATIONAL ASSEMBLY OF VIETNAM*
DAN *THE SUPREME AUDIT INSTITUTION OF VIETNAM-STATE AUDIT
OFFICE OF VIETNAM – SAV***

**DI REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM
17—21 SEPTEMBER 2024**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
A.	LATAR BELAKANG	3
B.	DASAR HUKUM	5
C.	PROFIL NEGARA YANG DIKUNJUNGI	5
D.	ALASAN KUNJUNGAN KERJA	7
E.	TUJUAN KUNJUNGAN KERJA	8
BAB II	PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA	11
A.	SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DELEGASI	11
B.	AGENDA KEGIATAN	12
1.	Pertemuan dengan <i>Finance-Budget Committee – National Assembly Of Vietnam</i>	14
2.	Pertemuan dengan <i>Auditor General of SAV</i>	19
BAB III	PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2018, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibentuk kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). DPR RI memiliki tiga fungsi, anggaran; legislasi; dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi anggaran, dibentuk Badan Anggaran, untuk memperkuat fungsi legislasi, dibentuk Badan Legislasi dan untuk memperkuat fungsi pengawasan, maka dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Dalam Pasal 23 E ayat (2) disebutkan pula, bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya”. Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.

Ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik memandatkan tugas BAKN DPR RI adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 72 huruf d, yang menyebutkan bahwa: “DPR bertugas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; dan huruf e menyebutkan “DPR membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK”.

Secara lebih spesifik, tugas BAKN DPR RI tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Pasal 112D ayat 1, yang menyebutkan: “BAKN bertugas: a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Pada ayat (2) disebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Lebih lanjut, dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Luar Negeri adalah ketentuan Pasal 145 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa “Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR”. Berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (3) itu, maka kunjungan BAKN DPR RI ke luar negeri dilaksanakan dalam kunjungan teknis ke negara tertentu. Kunjungan teknis ke negara tertentu adalah salah satu proses pembelajaran dengan cara *learning by doing* oleh Anggota DPR RI dalam delegasi parlemen untuk menambah wawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mitra kerjanya.

Hasil kunjungan teknis ke negara tertentu, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi anggota delegasi dalam melakukan fungsi pengawasan, sebagai dampak (*outcome*) dari *transfer of knowledge* atas negara tertentu yang dikunjungi.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kunjungan kerja luar negeri adalah :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Keputusan Rapat BAKN DPR RI Tanggal 19 Agustus 2024

C. PROFIL NEGARA YANG DIKUNJUNGI

Vietnam dengan nama resmi “Republik Sosialis Vietnam”, dan Hanoi sebagai Ibu Kota Negara. Hari Kemerdekaan adalah 2 September 1945. Vietnam memiliki total luas wilayah 331.210 km² meliputi daratan 310,070 km² dan perairan 21,140 km². Bahasa resmi adalah Bahasa Vietnam dengan Lagu Kebangsaan Tien Quan Ca (The Song of The Marching Troops). Bendera Negara dengan Warna dasar merah dengan bintang berwarna kuning; Merah melambangkan darah dan revolusi. Bintang melambangkan lima elemen populasi masyarakat Vietnam, yakni petani (peasant), pekerja (workers), kaum intelek (Intellectuals), pedagang (traders) dan tentara (soldiers) yang bersatu membangun sosialisme. Mata Uang Vietnam Dong (VND) Kurs Bank USD 1 = VND 25,418 (7 Juli 2024). Kepala Negara adalah Presiden Vo Van Thuong dan Kepala Pemerintahan yaitu Perdana Menteri Pham Minh Chinh (sejak 5 April 2021). Ketua Majelis Nasional adalah Vuong Dinh Hue dan Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son.

Populasi Vietnam sebesar 96,462,106 juta jiwa (2019). Sekitar 50 juta penduduk Vietnam menganut aliran kepercayaan (primitive religions). Aliran kepercayaan ini dipengaruhi oleh aspek dalam Taoism, Confusianism, dan

ajaran Buddha. Selain aliran kepercayaan, terdapat 6 agama dengan pengikut yang cukup besar di Vietnam, yaitu Buddha (sekitar 10 juta orang), Katolik (6 juta), Cao Dai (2,4 juta), Protestan (1,5 juta), Hoa Hao Buddha (1,3 juta), dan Islam (hampir 70 ribu). Selain itu, Vietnam memiliki 54 suku etnis yang tersebar di seluruh wilayah.

Profil ekonomi Vietnam ditandai dengan reformasi ekonomi sejak peluncuran *Đổi Mới* pada tahun 1986. Tren globalisasi dan perdagangan bebas mendorong Vietnam dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara dengan perekonomian berpendapatan menengah (middle income). PDB per kapita meningkat 6 kali lipat dalam waktu kurang dari 40 tahun, dari \$600 per orang pada tahun 1986 menjadi hampir US\$3.700 yang diukur berdasarkan harga konstan US\$ pada tahun 2015. Tingkat kemiskinan dengan US\$3,65/hari, berdasarkan paritas daya beli (PPP) pada tahun 2017 menurun dari 14% pada tahun 2010 menjadi hanya 4,2 persen pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam diproyeksikan mencapai 5,5 persen pada tahun 2024, didorong oleh peningkatan permintaan global dan pulihnya kepercayaan konsumen dalam negeri. Pertumbuhan PDB riil diprediksi menguat dalam tiga tahun ke depan, mencapai rata-rata sebelum pandemi pada tahun 2026. Sektor pertanian sebagai sektor unggulan tumbuh sebesar 2,5—3,5 persen per tahun selama tiga dekade terakhir. Sektor pertanian Vietnam menjadi pilar utama ketahanan pangan dan *me-leverage* pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian berkontribusi sebesar 13 persen pada PDB dan 29 persen pada lapangan kerja tahun 2021.

Vietnam merupakan salah satu negara penghasil dan pengeksport beras di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2019 Vietnam masuk dalam urutan ketiga di bawah India dan Thailand sebagai negara pengeksport beras di dunia. Ekspor beras Vietnam tercatat selalu surplus dalam neraca perdagangan Vietnam. Untuk meningkatkan net ekspor dan mengurangi tarif, Vietnam tergabung dalam unifikasi organisasi kawasan Asean.

D. ALASAN KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja BAKN ke luar negeri didasarkan pada konsep akuntabilitas yang dapat ditelusuri melalui pelaksanaan tugas fungsi BAKN yang bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan negara secara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAKN juga memastikan agar penggunaan keuangan negara lebih efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi pengawasan DPR RI yang dilakukan oleh BAKN bertujuan agar akuntabilitas sektor publik dalam penggunaan keuangan negara terlaksana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping asas akuntabilitas, fungsi pengawasan oleh BAKN juga mendorong penggunaan keuangan negara yang efisien dan efektif bagi seluruh lembaga negara dan pengguna keuangan negara.

BAKN 2019-2024 merupakan alat kelengkapan dewan "termuda" DPR RI periode 2019-2024, mengingat BAKN baru kembali dibentuk pada tahun 2018 sehingga membutuhkan contoh pola kerja yang baik dari alat kelengkapan dewan serupa di negara-negara lain. Saat ini, BAKN masih terus mencari bentuk pola kerja terbaiknya dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa hal utama yang menjadi isu utama pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh BAKN yaitu:

1. Peningkatan kualitas penelaahan hasil pemeriksaan BPK. Dengan kualitas penelaahan yang komprehensif dan berkualitas baik, dapat

- menjadi dasar dalam melakukan keputusan politik DPR RI terkait penggunaan keuangan negara oleh seluruh entitas yang mendapatkan pendanaan dari keuangan negara.
2. Pola kerja terkait tindak lanjut hasil pembahasan komisi terhadap hasil temuan BPK. Dengan pola kerja BAKN saat ini yang sifatnya “*bottom up*”, perlu diketahui mekanisme tindak lanjut yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan negara lain yang memiliki tugas serupa dengan BAKN.
 3. Hubungan BAKN dengan BPK RI selaku *supreme audit institution*. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, disebutkan bahwa BAKN dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Dalam konteks yang demikian itu, BAKN perlu mengetahui hubungan kerjasama yang ideal antara BAKN dengan BPK. Kerjasama ini terutama mengenai data dari BPK yang menjadi basis penelaahan bagi BAKN.
 4. Hubungan BAKN dengan lembaga-lembaga lain yang menggunakan keuangan negara dan juga merupakan *counterpart* dari komisi-komisi di DPR RI.

E. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Tujuan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Republik Sosialis Viet Nam adalah :

1. Untuk memahami tugas, fungsi, wewenang dan gambaran umum tentang *Finance-Budget Committee* Parlemen Vietnam (*National Assembly of Vietnam*) dan gambaran khusus tentang *The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam* yang terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.

2. Memahami mekanisme kerja antara *Finance-Budget Committee of The National Assembly of Vietnam* dengan *The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam*, dan bagaimana *The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam* mendukung kebutuhan parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.
3. Mendapatkan gambaran utuh dan komprehensif terkait dengan jenis, kategori, ruang lingkup, dan *time schedule* pemeriksaan keuangan negara oleh *The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam*, penyampaian hasil pemeriksaan kepada *Finance-Budget Committee of The National Assembly of Vietnam*, dan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan antara National Assembly of Vietnam dengan *The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam*.
4. Mendapatkan gambaran empirik bagaimana *Finance-Budget Committee National Assembly of Vietnam* melakukan penelaahan/reviu atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh *The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam*, dan *committee* terkait lainnya.
5. Mendapatkan gambaran tentang hubungan kerja antara *Finance-Budget Committee* dengan *committee* lain di *National Assembly of Vietnam* (Parlemen Vietnam), khususnya terkait dengan hasil pemeriksaan *The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam*.
6. Mengetahui gambaran mengenai tugas, fungsi, dan wewenang *Auditor General of Vietnam* yang terkait dengan pengawasan terhadap keuangan negara.
7. Mengetahui mekanisme kerja antara *Auditor General of Vietnam* dengan *Finance-Budget Committee*, dan bagaimana *Auditor General of*

Viet Nam mendukung kebutuhan parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.

8. Mendapatkan gambaran jenis, ruang lingkup, dan *time schedule* pemeriksaan keuangan negara oleh *Auditor General of Viet Nam* dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada *Finance-Budget Committee of The National Assembly of Viet Nam*.

BAB II
PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Susunan keanggotaan tim/delegasi diikuti oleh 8 (delapan) orang terdiri atas 5 (lima) Anggota BAKN DPR RI, 2 (dua) orang Staf Sekretariat BAKN DPR RI, dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BAKN DPR RI sebagai berikut.

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, SE	F-Demokrat	Ketua BAKN
2.	A-201	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	F-PDIP	Wakil Ketua BAKN
3.	A-423	Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.	F-PKS	Wakil Ketua BAKN
4.	A-83	Ir. Irwan Ardi Hasman	F-GERINDRA	Anggota
5.	A-498	Primus Yustisio, S.E., M.A.P.	F-PAN	Anggota
6.	-	Mardi Harjo, S.E., M.Si	-	Kabagset. BAKN
7.	-	Dwian Pujaswati, S.E.	-	Kasubag TU Set. BAKN
8.	-	Andi Muhammad Sadli, S.E., M.Si.	-	Tenaga Ahli BAKN

B. AGENDA KEGIATAN

Agenda kegiatan kunjungan Kerja Luar Negeri BAKN DPR RI ke Viet Nam dalam rangka melaksanakan fungsi diplomasi dan untuk mendapatkan masukan terkait dengan Finance-Budget Committee, National Assembly Of Viet Nam dan State Audit Of Viet Nam, Auditor General Of State Audit Viet Nam serta KBRI di Viet Nam di Republik Sosialis Viet Nam yang dilaksanakn Tanggal 15—21 September 2024 dengan agenda kegiatan sebagai berikut.

NO	DAY/DATE/TIME	AGENDA	DESCRIPTION
1	Tuesday, 17 September 2024		
	02.25 WIB	All Delegates met at Terminal 2F Soetta Airport,	
	05.25 – 08.10 (transit at Singapore airport)	Departure/Take off from CGK to Changi Airport	SQ 951H
	09.05-11.25 At Local Time	Departed for Bach Mai/ Noi Bai Airport Hanoi, Vietnam	SQ 192H
2	Wednesday, 18 September 2024		
	08.00-09.00 at Local Time	Breakfast	Hotel Somerset Grand Hanoi
	09.00 at Local Time	Go to The National Assembly of Viet Nam	
	09.30-10.30	Meeting with the Finance-Budget Committee of The National Assembly of Viet Nam	60 Minutes Approximately
	14.00-14.30	Go to The Supreme Audit Institution of Vietnam-State Audit (Auditor General of State Audit Viet Nam)	30 Minutus Approx.
	14:30-15.30	Meeting with The Supreme Audit Institution of Vietnam-	60 Minutes Approximately

		(Auditor General of State Audit Viet Nam)	
	15.30-16.00	Go to Indonesian Embassy at Viet Nam	Embassy - KBRI
	16.00-17.00	Meeting with the Indonesian Ambassador and Indonesian Embassy Officials	60 Minutes Approx.
	18.00-19.00	Dinner with Duta Besar RI untuk Viet Nam	
	19.00-20.30	Pre-Memory	
3	Thursday, 19 September 2024		
	08.00-09.00	Breakfast	Hotel
	10.00-12.00	Pre-Memory. Evaluation and monitoring Output Meeting	Internal Meeting
	12.00-13.30	ISHOMA	
	13.30-17.00	Pre-Memory. Evaluation and monitoring Output Meeting	
	17.00	Arrival at hotel	
4	Friday, 20 September 2024		
	08.00. – 09.00	Breakfast	At the Hotel
	10.00 – 12.00	Pre-Memory. Evaluation and monitoring Output Meeting	
	12.00 – 13.30	ISHOMA	
	13.30 – 17.00	Pre-Memory. Evaluation and monitoring Output Meeting	
	17.00	Arrival at hotel	
5	Saturday, 21 September 2024		
	03.00	Go to Bach Mai/ Noi Bai Airport in Vietnam	
	05.00-07:15	Departure HO CHI MINH TAN SON NHAT	VIETNAM AIRLINES VN 205/ECONOMY/T
	09:50 – 13:00	Departure/Take off from HO CHI MINH	VIETNAM AIRLINES VN631/ECONOMY/L

		TAN SON NHAT TERMINAL 2 to JAKARTA SOEKARNO TERMINAL 3	
--	--	--	--

Kunjungan kerja delegasi BAKN DPR RI ke Viet Nam mendapatkan hasil dan informasi meliputi dan tidak terbatas pada :

1. Pertemuan dengan the Finance-Budget Committee of The National Assembly of Viet Nam

Gambaran Umum Tentang National Assembly of Vietnam Majelis Nasional Vietnam

Majelis Nasional Vietnam adalah representasi tertinggi rakyat; otoritas tertinggi Republik Sosialis Vietnam. Majelis ini mempunyai tiga (03) fungsi utama: (1) membentuk undang-undang; (2) menetapkan keputusan terhadap persoalan-persoalan penting bangsa; dan (3) mengawasi pada tingkat tertinggi terhadap seluruh kegiatan Negara.

Sesuai dengan konstitusi Vietnam, sala satu tugas pokok dan hak khusus majelis atau badan ini adalah : melaksanakan hak pengawasan tertinggi atas kepatuhan terhadap Konstitusi, undang-undang dan resolusi Majelis Nasional; memeriksa pekerjaan Presiden Negara, Komite Tetap, Pemerintah, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Vietnam, Dewan Pemilihan Umum Nasional, **Kantor Audit Negara Vietnam** dan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh Majelis Nasional; menetapkan peraturan dan operasionalisasi Majelis Nasional, Presiden Negara, Pemerintah, Pengadilan Rakyat, Kejaksaan Rakyat, Dewan Pemilihan Umum, **Badan Audit Negara Vietnam**, pemerintah daerah dan badan-badan lain yang dibentuk oleh Majelis Nasional; dan memilih, memberhentikan, menjalankan peranan Presiden Negara, Wakil Presiden Negara, Ketua Majelis Nasional, Wakil Ketua Majelis Nasional, Anggota Panitia Tetap Majelis Nasional, Ketua Dewan Etnis , Ketua Komite Majelis Nasional,

Perdana Menteri Pemerintah, Ketua Mahkamah Agung Rakyat, Jaksa Agung Inspeksi Agung Rakyat, Ketua Dewan Pemilihan Umum Nasional, **Auditor Umum Negara**, Kepala lembaga lain yang dibentuk oleh Majelis Nasional; menyetujui usulan pencalonan, pemberhentian dan pemberhentian Wakil Perdana Menteri, Menteri dan kabinet Pemerintah, Ketua Mahkamah Agung Rakyat; menyetujui daftar nama anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Dewan Pemilihan Umum;

Masa jabatan masing-masing Badan Legislatif Majelis Nasional adalah lima tahun, terhitung sejak sidang pembukaan pertama masa jabatan sampai sidang pembukaan pertama sidang Majelis Nasional berikutnya. Dalam keadaan khusus, jika sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota parlemen menyetujui secara konsensus masa jabatan untuk diperpendek atau diperpanjang atas permintaan Komite Tetap. Perpanjangan masa jabatan tidak akan melebihi 12 bulan kecuali dalam keadaan perang.

Majelis Nasional Vietnam dipimpin oleh Ketua dan memimpin sidang Majelis Nasional; menandatangani pengesahan Konstitusi, Undang-undang, Resolusi Majelis Nasional; memimpin pekerjaan Komite Tetap Majelis Nasional; mengarahkan kegiatan luar negeri Majelis Nasional; menjaga komunikasi dengan anggota parlemen.

Delegasi BAKN DPR-RI yang dipimpin H. Wahyu Sanjaya, SE., M.Si telah melakukan kunjungan kerja ke Viet Nam dalam rangka melakukan pertemuan dengan **Finance-Budget Committee of The National Assembly of Viet Nam**. Pertemuan dilakukan dalam rangka *sharing best practices*, melakukan pertukaran informasi terkait sistem dan mekanisme audit serta pengawasan antar lembaga negara di Viet Nam dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi BAKN DPR-RI didampingi staf KBRI Viet Nam.

Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR-RI ke Viet Nam diharapkan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dan Viet Nam serta berkontribusi dalam

peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Beberapa hal yang didapat dari hasil diskusi adalah sebagai berikut :

1. Wakil Ketua Komite Keuangan dan Anggaran Majelis Nasional Vietnam menyambut dan menyampaikan salam kepada delegasi Indonesia. Kunjungan BAKN menunjukkan komitmen untuk bekerja sama erat antara kedua Parlemen, menuju peringatan 70 tahun hubungan kedua negara. Ketua Majelis Nasional Vietnam telah berhasil menyambut Presiden terpilih Indonesia, Prabowo, yang akan menjabat sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober. Bapak Le Quang Manh, Ketua Komite, sedang menjalankan tugas lain sehingga tidak dapat menghadiri pertemuan ini tersebut dan mewakilkan kepada Wakil Ketua.
2. Tujuan pertemuan adalah untuk mempererat hubungan dan kerja sama antara BAKN dan Komite Keuangan dan Anggaran Majelis Nasional, serta belajar praktik dan berbagi pengalaman.
3. Komite NAV sepakat dan sangat mengapresiasi semangat belajar dan berbagi dari BAKN. Ketua ingin berbagi sedikit tentang arsitektur dan konstruksi Gedung Majelis Nasional. Gedung Majelis Nasional dibangun 79 tahun yang lalu. Pada Januari 2026 nanti, Majelis Nasional akan merayakan 80 tahun pendiriannya. Majelis Nasional sekarang memiliki 499 anggota, dengan persentase perempuan yang tinggi, yaitu 30% pada periode 2021–2026. Majelis Nasional memiliki 10 komite dan komisi; selain itu, Sekretariat Majelis Nasional dan Kantor Majelis Nasional adalah dua lembaga pendukung dan konsolidasi untuk komite dan komisi.
4. Pada periode 2021–2026, Majelis Nasional telah mengesahkan 40 Undang-Undang dan Amandemen Undang-Undang, serta 40 Keputusan, 25 di antaranya terkait dengan Keuangan dan Anggaran. Ke depannya, Majelis Nasional akan mengamandemen pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi khusus, dan pajak penghasilan perusahaan.
5. struktur Komite Keuangan dan Anggaran, terdapat 42 anggota, 11 di tingkat pusat, dan 31 anggota lainnya bekerja di tingkat provinsi. Komite terdiri dari

- 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua, di mana 4 dari 5 wakilnya adalah perempuan, sementara yang tersisa adalah anggota tetap.
6. Terdapat 5 Sub-Komite di bawah Komite: Sub-Komite Sintesis Anggaran; Sub-Komite Investasi Publik; Sub-Komite Kebijakan Pengumpulan Anggaran; Sub-Komite Penyelesaian dan Audit; serta Sub-Komite Aset Publik dan Keuangan Negara di luar Anggaran.
 7. Berbeda dengan Indonesia, Badan Audit Negara Vietnam (SAV) adalah lembaga independen. Tanggung jawab dan kekuasaannya diatur dalam Undang-Undang Audit Vietnam. Para auditor bertanggung jawab untuk mengaudit, menyelesaikan anggaran negara, mengawasi topik-topik tertentu, menjelaskan, mencairkan dana investasi publik, serta menjelaskan rekomendasi dari audit negara.
 8. Badan Audit Negara Vietnam mengikuti standar dan aktivitas INTOSAI; oleh karena itu, mirip dengan BPK di Indonesia. Independensi diatur oleh Undang-Undang. Vietnam memiliki sekitar 600 auditor.
 9. Majelis Nasional hanya memilih 1 posisi, yaitu Auditor Jenderal, sedangkan Wakil Auditor Jenderal lainnya disetujui oleh Komite Tetap. Sementara itu, Indonesia memiliki 9 Auditor Jenderal yang dipilih melalui pemungutan suara di Parlemen, mereka mewakili berbagai partai. Setelah pemilihan 9 Auditor Jenderal, mereka akan melakukan pemungutan suara internal untuk menentukan pimpinan utama.
 10. SAV hanya melapor kepada Majelis Nasional. Majelis Nasional tidak memberikan rekomendasi atau ikut campur dalam rencana SAV. SAV mengirim laporan hasil pemeriksaan (laporan audit) 2 kali per tahun untuk laporan ringkasan hasil Audit. Selain itu, SAV juga mengirim laporan lain ke Komisi untuk referensi. Masa jabatan Auditor Jenderal SAV adalah 5 tahun, sebelumnya 7 tahun. Namun demikian, belum ada Auditor Jenderal yang menjabat lebih dari dua periode. Tidak ada aturan atau undang-undang tentang masa jabatan Auditor Jenderal.

11. Meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang, kesetaraan gender dalam organisasi politik Vietnam selalu dipromosikan dan Majelis Nasional sendiri juga mengarahkan bahwa jumlah anggota perempuan mencapai 30% dari total anggota Majelis Nasional. Pada periode ini, jumlah perempuan di Majelis Nasional mencapai 30,26%.
12. Anggaran nasional dihitung dan diselesaikan oleh Majelis Nasional. Anggaran nasional dibagi menjadi 4 tingkat: Pusat, Daerah (termasuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota). Tingkat daerah akan diselesaikan oleh Dewan Rakyat. Anggaran pusat mencakup lebih dari 50% dari total anggaran.
13. Penyalahgunaan keuangan negara di Viet Nam terdeteksi melalui berbagai saluran seperti audit dan inspeksi pemerintah, atau Komite Keuangan dan Anggaran. Lembaga yang mendeteksi masalah akan menanganinya. Jika pelanggaran menunjukkan tanda-tanda kriminal, itu akan diserahkan kepada Kementerian Keamanan Publik.
14. Komite audit, para ahli senior, mengevaluasi hasil audit. Sementara itu, Indonesia adalah sistem multi-partai dengan 81 daerah pemilihan di seluruh negeri. Indonesia memiliki 24 partai, dan hanya 8 yang berhasil masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Periode tahun 2024-2029. Partai-partai itu perlu memiliki total 4% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia menargetkan 20% perwakilan perempuan, namun angka ini belum tercapai setiap tahunnya. Tahun ini jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat adalah 21%, sedangkan tahun lalu 17%.
15. Batas utang publik Indonesia tidak boleh melebihi 60% dari PDB. Defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% dari PDB. Batas utang publik Vietnam tidak melebihi 60%. Ketika batas utang publik melebihi 55%, akan ada peringatan dari Majelis Nasional, dan defisit anggaran tidak melebihi 3,7% dari PDB. Secara umum, kedua negara memiliki kemiripan dalam konteks defisit dan utang publik.

Pokok bahasan pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Mrs. Pham Thuy Chinh, Vice Chairwoman Finance-Budget Committee – National Assembly (NA) Viet Nam antara lain :

1. BAKN dan Finance-Budget Committee – National Assembly (NA) sepakati pentingnya menjaga pertukaran antara parlemen dan terus mendorong Kerjasama bilateral menuju peringatan 70 tahun pembukaan hubungan Diplomatik pada tahun 2025.
2. Para pihak sepakat pentingnya memajukan keterwakilan perempuan dalam legislative
 - NA Viet Nam beranggotakan 499 anggotayang 30,26 % diantaranya adalah perempuan. Aturan Viet Nm tidak spesifik menetapkan persyaratan kuota keterwakilan perempuan di parlemen.
 - Kebersamaan kebijakan Viet Nam dan Indonesiaterkait Rasio utang terhadap PDB yakni 60 m% dan GDP. Indonesia tetapkan batas maksimum deficit APBN 3 % dan GDP sementara Viet Nam 3,7 %.



Foto Bersama antara The Budget - Finance Committee of The National Assembly Vietnam dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. Hadir dari Komite Keuangan dan Anggaran NAV adalah : Ms. Pham Thuy Chinh, Vice Chairman of the Finance and Budget Committee, Mr. Tran Van Lam, Standing Member of the Finance and Budget Committee, Mr. Le Minh Nam, Standing Member of the Finance and Budget Committee, Nguyen Thanh Trung, Standing Member of the Finance and Budget Committee, Ms. Tran Thi Hong An, Standing Member of the Foreign Affairs Committee, Ms. Bui Thi Quynh Tho, Standing Member of the Economic Committee, Mr. Vu Danh Hiep, Director of the Finance and Budget Department.

2. Pertemuan dengan Deputy Auditor General of The State Audit Viet Nam

Gambaran Umum Tentang *The Supreme Audit Institution of Vietnam—State Audit Office of Vietnam (SAV)*

State Audit Office of Vietnam atau Lembaga Audit Negara Tertinggi Vietnam – disebut pula Kantor Audit Negara Vietnam (SAV) didirikan pada tanggal 11 Juli 1994. Selama lebih dari satu dekade, SAV merupakan subordinasi atau lembaga dibawah kendali Pemerintah Vietnam. Organisasi dan tata kelola termasuk penugasan audit diputuskan oleh Pemerintah. Sementara itu, kegiatan pelatihan staf, penetapan standar dan proses audit profesional berada di bawah kendali langsung oleh Perdana Menteri.

Tahun 2006, SAV berubah menjadi lembaga independen pada saat Undang-Undang Pemeriksaan Negara pertama kali berlaku pada tanggal 1 Januari 2006. Undang-undang tersebut memandatkan SAV adalah badan khusus pemeriksa keuangan Negara yang dibentuk oleh Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) dan beroperasi secara independen dan bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan ini bertugas melaksanakan fungsi audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja pada semua lembaga dan organisasi yang menggunakan anggaran negara, termasuk penggunaan seluruh aset Negara di Vietnam.

SAV saat ini menjalankan operasinya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Audit Negara yang direvisi pada tahun 2015. Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sebagai aturan turunan atas status hukum Konstitusional SAV yang baru, untuk lebih menegaskan independensi SAV dan untuk memperluas mandat SAV.

Pertemuan dengan Deputy Auditor General of The State Audit Viet Nam menghasilkan pokok-pokok diskusi sebagai berikut :

1. Wakil Auditor General SAV menyampaikan salam kepada delegasi Indonesia dan menyampaikan permohonan maaf dari Auditor General

tidak dapat menyambut delegasi Indonesia dan mewakilkan kepada Deputy Auditor General.

2. Pihak Indonesia sangat mengapresiasi sambutan hangat dan penerimaan dari SAV. Kepala Delegasi memperkenalkan daftar delegasi Indonesia.
3. Tujuan pertemuan adalah mempererat hubungan dan kerja sama antara BAKN dan SAV, serta belajar praktik dan berbagi pengalaman.
4. SAV telah berdiri selama 30 tahun dan telah bekerja sama dengan BPK Indonesia, saling membantu dalam kegiatan bilateral dan multilateral. Mengikuti sistem politik satu partai, SAV agak berbeda dengan BPK. Hasil laporan SAV disampaikan langsung kepada Majelis Nasional.
5. Beberapa tanggung jawab utama SAV: SAV bertanggung jawab untuk memperkirakan anggaran negara, menyusun rencana alokasi anggaran pusat, rencana penyesuaian anggaran negara, rencana pengaturan anggaran untuk program target nasional dan proyek nasional penting yang diputuskan oleh Majelis Nasional, serta menyelesaikan anggaran negara; berpartisipasi dengan komisi Majelis Nasional dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, resolusi Majelis Nasional, dan resolusi Komite Tetap Majelis Nasional di bidang keuangan dan anggaran, mengawasi pelaksanaan anggaran negara dan kebijakan keuangan sesuai permintaan; menjelaskan hasil audit kepada Majelis Nasional dan komisi Majelis Nasional sesuai dengan undang-undang.
6. Vietnam memiliki sekitar 1700 auditor. Selain pimpinan, SAV memiliki 7 departemen penasihat, 8 departemen audit khusus, dan 13 kantor audit negara regional. Setiap kantor regional bertanggung jawab atas 4-5 provinsi di Vietnam. 1700 auditor harus menjadi pejabat negara, lulus ujian SAV untuk menjadi pejabat dan pejabat senior.
7. Seorang auditor dan pejabat negara dapat dimobilisasi ke posisi lain. Saat ini terdapat sertifikasi global seperti ACCA dan CPA untuk auditor, namun harus lulus ujian masuk SAV untuk menjadi pejabat SAV.

Kompensasi SAV lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Gaji serupa dengan posisi negara lainnya, namun auditor SAV mendapatkan tunjangan khusus. Secara umum, pendapatan auditor lebih tinggi dibandingkan pejabat negara lainnya.

8. SAV memiliki peran penting dalam struktur negara. Auditor Jenderal independen dalam hal profesi/teknis, tetapi di bawah arahan Partai karena Vietnam hanya memiliki satu Partai. Segala sesuatu harus berada di bawah panduan Partai.
9. Majelis Nasional memilih Auditor Jenderal melalui pemungutan suara. Di masa lalu, ada 2 orang yang tidak lulus pemungutan suara (perlu di atas 50% suara).
10. Ada 3 lembaga yang menerima laporan hasil audit SAV yaitu Auditor General, Komite Keuangan dan Anggaran Majelis Nasional, dan Kementerian Keuangan. Setiap bulan Mei, SAV harus menyerahkan laporan ringkasan dan lampiran semua audit selama setahun kepada Majelis Nasional, dan hasil semua audit ini harus diumumkan melalui konferensi pers. Menurut undang-undang, pendapat auditor dianggap benar, dan unit tersebut diwajibkan untuk melaksanakannya.
11. Vietnam memiliki 19 korporasi dan grup dengan mayoritas saham dimiliki oleh negara. Sementara itu, Laporan Hasil Pemeriksaan di Indonesia sangat kompleks, harus komprehensif dan menyoroti poin-poin penting.

Adapun pokok pokok bahasan dalam pertemuan tersebut diatas antara lain adalah :

- SAV telah berdiri selama 30 tahun dan memiliki sekitar 17000 auditor pada berbagai tingkatan pegawai SAV merupakan pegawai pemerintah yang direkrut melalui ujian masuk. Pegawai negari pada instansi ini dapat menjadi auditor di SAV dengan catatan harus memiliki sertifikasi keahlian auditor.

- Laporan audit dari SAV akan disampaikan kepada NA dan Kementerian Keuangan. Hasil temuan yang diperoleh akan diumumkan secara terbuka kepada publik . Apabila terdapat temuan pelanggaran yang berimplikasi pidana akan ditindaklanjuti oleh Ministry of Public Security.
- Kedua pihak bertukar informasi mengenai mekanisme pemilihan anggota Supreme Audit Agency, antara kedua negara :
 - 1) Auditor General SAV dipilih oleh NA, jabatan tersebut hanya diisi satu orang dengan masa jabatan lima tahun dan maksimal dua periode. Selanjutnya Auditor General berwenang menentukan lima orang pejabat untuk mengisi jabatan Deputy Auditor General.
 - 2) Sedangkan di Indonesia BPK RI terdiri dari 9 anggota yang dipilih oleh DPR RI kemudian dalam sidang internal yang dilakukan Anggota BPK akan ditentukan siapa yang akan menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua.





Foto Bersama antara State Audit of Viet Nam dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI di Kantor State Audit of Viet Nam. Hadir dari SAV adalah : . Ms. Ha Thi My Dung, Deputy Auditor General, Mr. Do Van Tao, DG of Personnel and Organization, Mr. Le Hoai Nam, DDG of General Affairs, Ms. Dang Thi Hoang Lien, DDG of Audit Policy and Quality Control, Mr. Huynh Huu Tho, DDG of Legal, Mr. Le Tung Lam, Chairman of Office, Mr. Nguyen Viet Hung, DDG of International Cooperation, Mr. Nguyen Viet Ha, secretary of Vice Auditor General.

3. Pertemuan dengan Kepala KBRI Viet Nam terdapat beberapa catatan :

- Pertukatan dalam rangka sharing best practices terkait sistem dan mekanisme audit serta pengawasan antar lembaga negara yang dilakukan BAKN DPR RI bermanfaat dalam upaya bersama untuk memajukan good government dan tata kelola keuangan negara yang efektif dan efisien.
- Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR RI ke Hanoi diharapkan dapat meningkatkan kedekatan dan kerjasama erat antar parlemen kedua negara khususnya dalam mendukung komitmen elevasi Kemitraan Strategis menjadi Comprehensive Strategic Partnership pada peringatan 70 tahun pembukaan hubungan diplomatik RI – Viet Nam pada tahun 2025.



Foto Bersama antara Duta Besar Indonesia untuk Negara Viet Nam dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI di Kantor Kedutaan Besar Indonesia untu Negara Viet Nam

BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ke Negara Viet Nam. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, pertimbangan dan rujukan dalam meningkatkan peran dan fungsi BAKN DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang.

Jakarta, 23 September 2024
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DPR RI,
KETUA

H. WAHYU SANJAYA S.E., M.M.

A-533